

B 27

ISBN : 978-979-26-1968-3

PENDIDIKAN

untuk

**PENCERAHAN & KEMANDIRIAN
BANGSA**



PENDIDIKAN UNTUK PENCERAHAN DAN KEMANDIRIAN BANGSA

ISBN: 979-26-1968-2
978-979-26-1968-3

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

Cetakan 1, Mei 2013

Editor : Dwi Siswoyo
Layout & desain cover : Didik Kurniawan

Percetakan
Ash-Shaff

Jl. Timoho No. 124 Yogyakarta 55221
Telp. (0274) 5864243 Fax. (0274) 557793
Email: shaff_ash@yahoo.com

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Kami memuji, memohon pertolongan, serta memohon curahan ampunan kepada-Nya. Berkat rahmat dan hidayahNya alhamdulillah hari ini Selasa, 21 Mei 2013 kita dapat memperingati Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Sebagai pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan sebagai anggota civitas akademika UNY, saya selalu berdoa semoga UNY tetap berjaya.

Sebagai wujud rasa syukur telah memasuki usia ke-49, FIP UNY menyelenggarakan beberapa agenda untuk memperingati Dies Natalis ke-49 UNY. Salah satu agenda penting yang diselenggarakan FIP adalah penulisan buku yang bertajuk *Pendidikan untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*. Penulisan buku ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam peran ilmu pendidikan dalam menjelaskan berbagai dinamika fenomena sosial selama ini. Penjelasan teoretik komprehensif tentang isu-isu pendidikan yang berkembang selama ini diharapkan dapat terwujud melalui buku ini. Begitu juga kajian pragmatik solutif dalam buku ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah-masalah pendidikan kita. Melalui penulisan buku ini para Doktor dan Guru Besar dari berbagai program studi di FIP berkontribusi untuk memecahkan masalah pendidikan dari perspektif prodinya masing-masing. Kesadaran tentang program studi sebagai *kamar* (yang bersinergi dengan kamar lain) yang berada di *rumah besar FIP*, diharapkan dapat terwujud melalui penulisan buku ini, sehingga mereka tidak terjebak pada sekat-sekat sempit program studi.

Sebagai pimpinan fakultas saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada para penulis yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga buku ini dapat tersusun. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi upaya mencerahkan dan memandirikan bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2013
Dekan FIP UNY

Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 196009021987021001

buku ini sangat membahagiakan bagi para penulis karena akan menjadi bahan dialog yang sangat berharga dalam mewujudkan fusi horison makna, yang pada gilirannya dari fusi itu sudah barang tentu masih mengundang dialog yang tiada henti demi dinamika sebuah karya yang rejuvenatif. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 21 Mei 2013
Editor

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan	iii
Pengantar	v
DAFTAR ISI	vii
MEMPERKENALKAN ANALISIS FILOSOFIS SEBAGAI PENDEKATAN DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN Prof. Dr. Acmad Dardiri, M.Hum	1
RELEVANSI PENDIDIKAN KRITIS DI INDONESIA Dr. Sugeng Bayu Wahyono	11
PENDIDIKAN UNTUK PENCERAHAN DAN PEMANDIRIAN BANGSA Dr. Sugito, MA	32
TANTANGAN PENDIDIKAN DALAM KEHIDUPAN MODERN : SUATU PERUBAHAN PARADIGMA Prof. Dr. Sodik A. Kuntara, M.Ed.	46
LANDASAN FILSAFATI ILMU PENDIDIKAN Dr. Rukiyati, M.Hum.	62
MEMBANGUN PENDIDIKAN SEBAGAI ILMU UNTUK PENCERAHAN KEMANUSIAAN Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum	75
PUDARNYA KEMANDIRIAN BANGSA: ADAKAH PERAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN? Prof. Dr. Yoyon Suryono, MS.	94
ILMU PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si	101
<i>CURRENT ISSUES</i> (Suatu Kajian Dalam Dunia Pendidikan) Dr. Ibnu Syamsi	126

PENDIDIKAN MENUJU MANUSIA SEUTUHNYA : Inkonsistensi dan Paradoks Inter/Antar-Kebijakan sampai Praksis Pendidikan Dr. Udik Budi Wibowo, M.Pd.	140	TEORI SELF-AKOMODASI-TRANSFORMATIF-EDUKATIF DALAM REFLEKSI HISTORIS PENDIDIKAN KHUSUS DI JAWA Dr. Mumpuniarti, M.Pd.	327
REALISASI DAN EKSISTENSI <i>EDUCATION FOR ALL</i> SEBAGAI PEMANDIRIAN BANGSA DI ERA OTONOMI DAERAH Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si.	157	MODEL PERKULIAHAN TERINTEGRASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCERAHAN DAN PEMANDIRIAN BANGSA Dr. Iis Prasetyo, MM.	346
KAJIAN <i>ECONOMIC RETURNS OF EDUCATION</i> Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.	179	TEORI PENDIDIKAN BAHASA DAN PERKEMBANGAN BAHASA PESERTA DIDIK Dr. Ali Mustadi, M.Pd.	360
MENGGALI NILAI-NILAI PENDIDIKAN DARI PRAKSIS BUDAYA JAWA: TINJAUAN DARI ASPEK METODOLOGI Prof. DR. Wuradji, MS.	190	PENCERAHAN DAN KEMANDIRIAN PESERTA DIDIK : SUDUT PANDANG PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Dr. Rita Eka Izzaty, M.Si, Psi	374
MENCERAHKAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN INFORMAL Dr. Sujarwo, M.Pd.	204	MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SUATU REALITA) Dr. Wiwik Wijayanti, M.Pd.	390
PENDIDIKAN INKLUSIF: MEMBUKA SEKAT PERBEDAAN ANAK BANGSA Dr. Suparno, M.Pd.	225	PENDIDIKAN KARAKTER BAGI MAHASISWA PGSD MELALUI NOVEL <i>PERTEMUAN HATI KARYA NH. DINI</i> Dr. Enny Zubaidah, M.Pd.	399
MENJADI SEKOLAH YANG MANDIRI Dr. Cipi Safrudin Abdul Jabar.	239	PEMBELAJARAN YANG MENCERAHKAN BAGI BERKEMBANGNYA POTENSI INDIVIDU Dr. Haryanto, M.Pd.	418
"BERDIKARI" TUJUAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MENGATUR DIRI : TINJAUAN TEORI KOGNITIF SOSIAL Dr. Muh. Nurwangid, M.Si.	256	KUALITAS PENDIDIK (GURU) INDONESIA Dr. Suwarjo, M.Si.	433
MEMBANGUN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR MELALUI PEMBELAJARAN SAINS Dr. Pratiwi Pujiastuti, M.Pd.	271	PARADIGMA, PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN FENOMENOLOGI Dr. Mami Hajaroh, M.Pd.	443
BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MEMANDIRIKAN SISWA Dr. Budi Astuti, M.Si.	286		
MODEL PEMBELAJARAN BAGI ANAK-ANAK KELUARGA MISKIN DAN TERPINGGIRKAN Prof. Dr. C. Asri Budiningsih.	300		
KOMPETENSI DAN TUGAS GURU SEKOLAH INKLUSIF Dr. Sari Rudyati, M.Si.	311		

- Gordon, Stephen P. (2004). *Professional Development for School Improvement: Empowering Learning Communities*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Gowin, Bob D. (1981). *Educating*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Kaufman, Roger, Jerry Herman & Kathi Watters. (2002). *Educational Planning: Strategic, Tactical, and Operational*. Maryland USA: Scarecrow Press, Inc.
- Marshall, Catherine & Cynthia Gerstl-Pepin. (2005). *Re-Framing Educational Politics for Social Justice*. Boston: Pearson Education.
- Mochtar Buchori. (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wagner, Tony. (2008). *The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach The New Survival Skills Our Children Need And What We Can Do About It*. New York: Basic Books.

REALISASI DAN EKSISTENSI *EDUCATION FOR ALL* SEBAGAI PEMANDIRIAN BANGSA DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh :

Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum
ireneast@yahoo.com

Pendahuluan

Mengawali tulisan ini penulis banyak terinspirasi dari beberapa statemen kritis yang dilontarkan oleh Prof. Suyata, Ph.D terkait dengan masalah pendidikan, masalah persekolahan di Indonesia, khususnya dalam forum diskusi di kelas progam Ilmu Pendidikan S3 PPs UNY. Saat ini, peran pendidikan dalam pemandirian bangsa belum optimal. Persoalan pendidikan di Indonesia sangat kompleks membutuhkan penanganan komprehensif. Masalah pendidikan di Indonesia tak lepas dari kondisi masyarakatnya, bahwa pendidikan dapat memajukan ekonomi, politik, kesehatan dan sebagainya. Akan tetapi dalam kenyataannya justru yang terjawab sebaliknya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Prof. Suyata, Ph.D yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan politik semakin tidak stabil, kesejahteraan masyarakat semakin timpang/tidak merata, kesehatan masyarakat tidak semakin baik. Dalam realitasnya, ada kecenderungan bahwa masyarakat kelas bawah tidak terlalu peduli dengan kemajuan negara, mereka tidak merasa perlu dengan pendidikan, mereka hanya mementingkan bagaimana dapat hidup aman dan tenteram dengan hidup sederhana. Masyarakat kelas atas yang kadang-kadang bermasalah. Mereka semakin tidak peduli dengan lingkungan, semakin individualis, semakin banyak tuntutan dan eksklusif serta menjadi penyebab timbulnya separatis, pertentangan/pertikaian antar elit, meningkatnya korupsi. Senada juga dinyatakan oleh Muchtar Buchori bahwa dunia pendidikan juga berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks seperti halnya : ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan, arogansi kekayaan, dan arogansi intelektual, kebringasan sosial, perilaku sosial menyimpang, perubahan tata nilai, perubahan gaya hidup sosial .

Masyarakat dan pendidikan memiliki dinamika sosial. Analisis kritis juga diberikan oleh Prof. Suyata. Ph.D dalam forum diskusi di

kelas program Ilmu Pendidikan S3 PPs UNY bahwa hubungan pendidikan dan masyarakat membuktikan bahwa Negara-negara maju cenderung pendidikannya maju. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang pendidikannya cenderung belum maju. Lebih lanjut, kenyataan tersebut dapat terjadi karena pendidikan dan hasilnya hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Sementara orang miskin tetap terpuruk dalam ketertinggalannya, tidak mampu bangkit mengentaskan diri dari jurang kemiskinan. Untuk memasuki dunia pendidikan tidak terjangkau karena biaya pendidikan begitu mahal. Pendidikan yang mahal hanya dinikmati oleh orang kaya. Fenomena tersebut membuktikan bahwa kemajuan terjadi secara selektif terhadap orang-orang tertentu saja ataukah kemajuan itu terjadi secara universal. Bagaimana agar kemajuan dapat terjadi secara universal? Barangkali belum ada formulanya. Kesepakatan *Education for All* masih menjadi pekerjaan besar bagi negara-negara sedang berkembang. Pertanyaan sesungguhnya adalah bukan *How much education*? akan tetapi *What kind of education*? Hal inilah yang harus selalu dan terus menerus dijadikan sebagai bahan kajian dan menarik untuk dikomparasikan.

Hubungan antar pendidikan dan masyarakat dapat dianalisis dalam lintas kultural, lintas sosial dan lintas etnis. Dalam konteks inilah Prof. Suyata, Ph.D menjelaskan bahwa pendidikan sebagai instrument pembangunan masyarakat ternyata tidak banyak digunakan oleh negara. Negara-negara yang membangun masyarakat melalui instrumen pendidikan adalah negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan. Negara-negara yang pendidikannya tinggi tapi masyarakatnya belum maju seperti Mesir, Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sebaliknya negara-negara Eropa masyarakatnya sudah maju kemudian membangun pendidikan yang diperlukan membangun industri-industri penting bagi kehidupan masyarakatnya. Bagi penulis, realitas tersebut membuktikan bahwa setiap negara mempunyai strategi yang berbeda dalam merealisasikan pembangunan di bidang pendidikan. Perbedaan inilah yang membuktikan bahwa secara sosiologis pembangunan pendidikan memiliki variabel sosial, ekonomi, budaya dan politik. Perbedaan varian yang menyebabkan dinamika

pembangunan pendidikan sarat dengan masalah yang membutuhkan penanganan yang serius.

Dalam konteks pemandirian bangsa, masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan terbukti menjadi salah satu kekuatan untuk masyarakat berubah. Karena pendidikan adalah salah satu agen penting perubahan. Untuk mempertegas statemen ini, sebagaimana dijelaskan oleh Suyata dalam forum diskusi di kelas program Ilmu Pendidikan S3 PPs UNY yang menjelaskan bahwa bagi Indonesia ada pengalaman pahit dimana masyarakat yang dibangun pendidikannya tapi kemudian lepas karena pemberontakan masyarakat terdidik. Demikian halnya, pembangunan pendidikan yang terlalu cepat disatu pihak tidak disertai dengan kesiapan masyarakatnya menerima keadaan yang ada dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan masyarakatnya menganggur dan gampang terpropokasi dengan paham kebebasan dan menimbulkan pemberontakan menyebabkan akhirnya Timtim terlepas dari Indonesia pada tahun 1999. Pertanyaan selanjutnya lalu pendidikan itu untuk siapa? apakah pendidikan bermanfaat atau menguntungkan bagi individu atau untuk hanya bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu?

Analisis kritis tentang eksistensi pendidikan menjadi kajian yang sangat menarik. Hal ini terjadi karena paradok dalam proses pembangunan pendidikan terus terjadi. Namun demikian, kebijakan pendidikan di era otonomi daerah belum berhasil mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Pendidikan seperti satu keping uang, di satu sisi memberikan manfaat dan sisi lainnya menjadi sumber masalah. Realitas tersebut didukung oleh analisis kritis Prof. Suyata, Ph.D dalam forum diskusi di kelas program Ilmu Pendidikan S3 PPs UNY yang menggambarkan bahwa secara sederhana dapat diamati dalam kehidupan di sekitar masyarakat kita, bahwa orang sepakat bahwa pendidikan akan menghasilkan orang pintar. Biasanya orang pintar karena kepintarannya cenderung menyalahkan orang lain. Dirinya sendiri tidak pernah salah, selalu merasa diri benar. Sebaliknya orang bodoh cenderung menyalahkan diri sendiri karena kebodohnya. Karena kondisi tersebut maka terjadilah penindasan orang pintar terhadap orang bodoh. Keyakinan banyak orang

sehingga pemerintah berusaha keras memajukan pendidikan bagi masyarakat. Padahal logika empirik menyatakan hal yang berbeda. Pendidikan bisa saja menjadikan manusia cerdas (*smart*) tapi belum tentu membentuk manusia menjadi baik (*good*). Orang cerdas belum tentu baik. bahkan semakin cerdas seseorang semakin berpotensi untuk membuat kerugian yang lebih besar. Buktinya pelaku-pelaku korupsi dan kejahatan kerah putih adalah orang-orang yang cerdas. Semakin cerdas pelaku korupsi semakin besar kerugian negara yang ditimbulkan. Analisis Suyata tersebut membuktikan bahwa realitas sosial yang terkait dengan pembangunan pendidikan menggambarkan dua hal yakni adanya realitas yang bersifat obyektif dan realitas subyektif. Berdasarkan perbedaan realitas tersebut yang menyebabkan bahwa dinamika pembangunan pendidikan antar negara, antar daerah, antar masyarakat, antar sekolah cenderung menggambarkan perbedaan dalam proses dan hasilnya.

Hasil pembangunan pendidikan di Indonesia belum mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam konteks inilah, analisis Berger yang menekankan adanya perbedaan realitas obyektif dan realitas subyektif dalam kehidupan sosial dapat digunakan untuk memahami proses pembangunan pendidikan di era otonomi daerah yang sarat dengan keinginan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pendekatan fenomenologi dengan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luckman menyatakan bahwa proses berpikir secara fenomenologi dimulai dari proses pemahaman atas kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai realitas utama. Kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses yang terus-menerus melalui pengalaman intersubyektif. Melalui intersubyektif dapat menjelaskan bagaimana masyarakat tertentu dibentuk secara terus-menerus. Konsep intersubyektif menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individu dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintrigasi dan berintegrasi (Berger, 1990).

Dalam hal ini, Peter Berger dan Thomas Luckman lebih seimbang dalam melihat hubungan manusia dengan masyarakat. Mereka memandang bahwa ketika seseorang berinteraksi, mereka akan menghasilkan nilai, norma, bahasa, ideas, institusi sosial yang

Sementara Durkheim, menekankan pada dimensi sosial dalam hubungan-hubungan individu dalam masyarakat (Berger,1990). Manusia adalah pencipta kenyataan sosial obyektif melalui proses eksternalisasi. Sementara itu kenyataan obyektif mempengaruhi kembali proses internalisasi. Menurut Berger, masyarakat adalah suatu fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat adalah sebagai kenyataan obyektif dan sekaligus sebagai kenyataan subyektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya Sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dan masyarakat ialah pembentuk individu. Keduanya menggambarkan sifat dialektis inheren dari fenomena masyarakat. Kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan obyektif dan subyektif. Kenyataan obyektif ialah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subyektif ialah kenyataan yang berada dalam diri manusia (Berger, 1990).

Analisis Berger memberikan pemahaman tentang masyarakat sebagai fenomena dialektik dalam pengertian masyarakat adalah suatu produk manusia, yang akan selalu memberi umpan baik kepada produsernya. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia. Realitas sosial tak terpisah dari manusia, sehingga dipastikan bahwa manusia adalah produk masyarakat (Berger,1990). Berkaitan dengan konsep eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi Berger menjelaskan bahwa *eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. *Obyektivasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. *Internalisasi* ialah proses individu mengidentifikasikan diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi di mana individu menjadi anggotanya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Berger bahwa dialektika tiga hal berjalan secara simultan, artinya ada proses menarik ke luar (*eksternalisasi*) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar

(internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan juga merupakan sesuatu yang berada di dalam diri.

Berdasarkan beberapa latar belakang pemikiran tersebut, khususnya dalam perspektif Berger, penulis akan memaparkan beberapa pikiran yang terkait dengan persoalan bagaimana realisasi dan eksistensi *education for all* di Indonesia dalam kebijakan pendidikan yang desentralistik? Bagi penulis pemandirian bangsa tidak akan pernah berhasil, jika pembangunan pendidikan belum berhasil dengan tuntas, khususnya jika masih ada anak usia wajib belajar tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah.

Kebijakan Wajib Belajar : Realisasi dan Eksistensi *Education for All*

Realisasi pembangunan pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah sebagai bentuk respon *education for all*. Kebijakan wajib belajar merupakan salah satu upaya untuk merespon isu global yang terkait dengan pendidikan untuk semua. Namun demikian, implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia masih menghadapi dua kendala pokok yakni kendala struktural dan kultural. Kendala struktural ditunjukkan dengan belum meratanya kesempatan pendidikan bagi semua masyarakat untuk belajar dalam semua level pendidikan. Bahkan struktur sosial masih menggambarkan kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketimpangan pendidikan yang hampir terjadi pada semua level pendidikan. Padahal, semua warga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang sudah dibangun oleh kekuatan landasan hukum yang kuat yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang pada intinya memiliki ketentuan umum bahwa wajib belajar adalah program pemerintah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya, penjaminan wajib belajar sudah dirancang dengan detail yang pada intinya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; Warga negara Indonesia yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan; Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya sesuai peraturan perundang-undangan (Sairin, 2012:143-144). Dalam hal ini, proses pelaksanaan kebijakan pendidikan sesungguhnya secara obyektif tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dianalisis dalam tatanan implementasinya dengan memperhatikan dimensi program, proses, dan evaluasinya. Karena, kebijakan pendidikan tentang wajib belajar tidak cukup dengan diatur oleh UU dan PP tetapi yang terpenting adalah kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola pendidikan dasar secara profesional, dan juga membangun kesadaran masyarakat untuk merealisasikan hak pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kendala kultural bersumber masih lemahnya budaya sadar bersekolah dalam kehidupan masyarakat. Upaya membangun budaya sadar bersekolah membutuhkan kompetensi kultural. Membangun kompetensi kultural menjadi prasyarat penting dalam mengatasi masalah pendidikan dasar di Indonesia (Dwiningrum, 2013). Kompetensi kultural menjadi unsur pokok dalam membentuk masyarakat pembelajar yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan oleh Zamroni (2011:35) bahwa ada empat faktor pembentuk kompetensi kultural: a) penguasaan pengetahuan, b) daya kritis, c) kemampuan mengembangkan sesuatu atau pengetahuan, d) kemampuan praktis. Keempat faktor tersebut tidak statis, melainkan dinamis, terus berlangsung tidak kenal henti, terus berkembang, berinteraksi dan saling memberikan umpan balik satu sama lain. Dalam proses interaksi tersebut memiliki sifat kontekstual.

berproses dengan menyesuaikan pada kondisi dan situasi yang ada. Proses yang terjadi menghasilkan berbagai output yang bisa menjadi umpan balik bagi masing-masing faktor yang ada. Untuk mengatasi mengatasi masalah pendidikan dasar di Indonesia ke empat kompetensi tersebut harus dibangun pada semua level keluarga, level sekolah dan level masyarakat. Upaya untuk pengembangan kompetensi kultural dalam pendidikan dasar dapat dideskripsikan sebagai berikut (Dwiningrum, 2013):

Faktor	Level		
	Keluarga	Sekolah	Masyarakat
Penguasaan pengetahuan	Memahami tujuan belajar di sekolah dalam pengembangan potensi anak	Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat	Mensosialisasikan peran pendidikan dalam membangun masyarakat berbudaya.
Daya kritis	Membiasakan anak untuk mengemukakan pendapat, berpikir positif, kreatif dan proaktif.	Mengintegrasikan mata pelajaran yang melatih proses belajar sehingga anak dapat mengemukakan pendapat, berpikir positif, kreatif dan proaktif untuk dapat menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa mengenai setiap hal yang dipelajari (Zuchdi, 2008:123 dalam Dwiningrum, 2011)	Membangun budaya demokratis dalam kehidupan sosial dan bernegara.
Kemampuan mengembangkan sesuatu dan pengetahuan	Memilih model sekolah yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan keluarga, orientasi keluarga agar anak sukses belajar di sekolah.	Menggerakkan masyarakat membangun sekolah sebagai "key school" yang mampu menjadi model sekolah masyarakat yang direpson oleh warga sekolah.	Kebijakan daerah dengan mengembangkan "key school" sebagai pusat pendidikan dan belajar masyarakat.

Kemampuan praktis	Menanamkan ketrampilan sosial, ketrampilan budaya dan kemampuan beradaptasi pada anak oleh keluarga.	Mengembangkan ketrampilan sosial, ketrampilan khusus, <i>soft-skill</i> sesuai dengan tujuan sekolah dan kebutuhan masyarakat.	Membangun wahana belajar masyarakat yang menyatu dengan kehidupan sekolah dengan program khusus yang dibutuhkan warga masyarakat.
-------------------	--	--	---

Sumber : Dwiningrum, 2013

Pengembangan kompetensi kultural harus dilakukan dengan pendekatan sistemik dan kontekstual agar hasilnya dapat maksimal. Pendekatan sistemik dimaksudkan untuk mengatasi masalah pendidikan dasar harusnya memperhatikan semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan, yakni tidak hanya terbatas pada level keluarga, tetapi harus didukung oleh perubahan perilaku pada level sekolah dan level masyarakat. Upaya untuk melakukan asesmen perilaku belajar pada level keluarga, level sekolah, level masyarakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga desain program untuk pendidikan dasar benar-benar dapat dirancang sesuai dengan data lapangan, dalam hal ini membuat program "based on data" harus menjadi budaya pemerintah pusat dan daerah dalam merespon setiap perubahan kebijakan pendidikan. Sedangkan, pendekatan kontekstual lebih menekankan pada kebutuhan dan kondisi sosial-budaya masyarakatnya (Dwiningrum, 2013).

Pengembangan kompetensi kultural mendukung keberhasilan program pendidikan wajib belajar perlu dukungan keluarga maupun peran masyarakat. Problem wajib belajar bersumber dari kegagalan keluarga dalam mendidik anak untuk sadar bersekolah disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural. Oleh karena itu, kepedulian pemerintah untuk membangun kesadaran bersekolah dalam keluarga sebaiknya harus menjadi gerakan moral yang membentuk budaya sadar bersekolah yang secara terus-menerus disosialisasikan antar generasi. Membangun "budaya malu tidak sekolah" bukan hal yang mudah dilakukan, jika semua unsur pembentuk masyarakat dan unsur pengelola pendidikan tidak termotivasi dengan tulus hati sebagai gerakan moral bangsa yang tidak henti untuk diperjuangkan sampai dengan berkurangnya jumlah anak yang tidak sekolah, putus sekolah dan tidak sekolah pada setiap wilayah daerah di Indonesia.

masih menjadi mimpi bangsa Indonesia, karena dalam dimensi struktur peran masyarakat pun belum optimal. Karena sebagian besar masyarakat dalam struktur lapisan sosial bawah belum seluruhnya mendapat kesempatan belajar yang optimal, sebagaimana diatur pada Bab VII, pasal 13 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat yang berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan wajib belajar (Sairin, 2012:145). Keinginan negara untuk memberikan kesempatan pada semua warga masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikan bukan sekedar mimpi, tapi sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang sudah 68 tahun merdeka tetapi mimpi itu belum tercapai.

Kapan mimpi itu terwujud? Sebuah masyarakat yang terdidik dengan kehidupan yang harmoni, tanpa ada kekerasan, tanpa ada konflik, tanpa ada penyimpangan sosial, baik dalam keluarga dan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai dengan anak-anak yang tumbuh kembang dengan sehat, anak-anak yang bersemangat dalam belajar, anak-anak yang kreatif dan produktif, anak-anak yang tersenyum dengan prestasi, anak-anak yang bernyanyi dalam keceriaan, anak-anak yang hidup dengan cita-cita, anak-anak yang termotivasi belajar sepanjang hidupnya, anak-anak yang senang berkreasi dalam bakatnya. Bukan gambaran anak yang malas belajar, anak yang takut ke sekolah, anak yang sedih karena tak dapat bersekolah, anak yang tidak berani berpendapat, anak yang tak mampu beli buku, anak yang "bunuh diri" karena tak dapat bayar sekolah, anak yang stres menghadapi ulangan, anak yang stres karena gagal dalam ujian nasional, anak yang berkeliaran di jalan untuk bekerja, anak yang menjadi pengemis jalanan, anak yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya. Betapa indah jika terbentuk kehidupan bernegara yang saling menghargai, saling menghormati dan saling peduli dengan sesama untuk terus memperjuangkan peran pendidikan sebagai kekuatan bangsa dalam memperbaiki kualitas kehidupan. Kehidupan keluarga yang

tentang kehidupan, tak ada KDRT, tak ada konflik orangtua-anak. Kehidupan masyarakat pembelajar yang digambarkan dengan adanya pusat belajar masyarakat dan budaya jam wajib belajar yang terus hidup dalam menghadapi perubahan sosial-budaya dan intervensi teknologi dalam proses pendidikan di masyarakat. Realisasi *education for all* melalui kebijakan wajib belajar masih harus diperjuangkan dengan pengembangan kompetensi kultural, sehingga eksistensi peran pendidikan dasar menjadi kekuatan dalam pemandirian bangsa menjadi realitas obyektif.

Eksistensi pendidikan untuk semua haruslah diakui sebagai media pemandirian bangsa. Kekuatan membangun eksistensi pendidikan untuk semua ditentukan oleh keinginan negara membangun fondasi karakter bangsa melalui pendidikan. Dalam kontes inilah, kebijakan pendidikan yang dibangun oleh pemerintah tidak sekedar aturan normatif, tetapi yang terpenting sebagai realitas obyektif sesuai dengan tujuannya. Bagi Indonesia penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik masih harus dikaji dalam prosesnya. Hal ini penting, karena masih adanya perbedaan realitas obyektif dan realitas subyektif dalam penerapannya. Secara obyektif, khususnya kebijakan program wajib belajar dalam era otonomi daerah hasilnya belum optimal. Demikian halnya, respon pemerintah di tingkat daerah belum maksimal. Sebagai akibatnya, realisasi wajib belajar sebagai hak untuk semua warga belum terwujud dalam kehidupan masyarakat belum terintegrasi (Dwiningrum, 2012:133).

Kegagalan penerapan kebijakan wajib belajar didukung oleh realitas subyektif yang dimiliki oleh warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran membangun budaya sadar bersekolah. Dalam hal ini diperlukan proses *eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Demikian halnya, *obyektivasi* yang menggambarkan interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. *Internalisasi* ialah proses individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi di mana individu menjadi anggotanya untuk membangun budaya bersekolah dan mencari ilmu sepanjang hayat. (Dwiningrum, 2012:133).

Disamping itu, pelaksanaan *education for all* membutuhkan kebijakan pendidikan dasar yang kuat membutuhkan proses eksternalisasi. Bagi Indonesia, desentralisasi pendidikan belum mampu untuk mengatasi masalah pembangunan pendidikan di Indonesia. Padahal, dengan desentralisasi pendidikan telah mengubah struktur kewenangan dalam tatanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pada satuan pendidikan memberikan peluang untuk mengatur persoalan pendidikan lebih fokus pada setiap daerah. Demikian halnya, dengan desentralisasi pendidikan mengubah berbagai peran-peran penting dalam proses pengelolaan pendidikan lebih terkontrol dalam penerapannya di tingkat daerah. Namun demikian, dinamika sosial terjadi dalam proses perubahan kebijakan, proses desentralisasi pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang untuk mengubah sikap partisipatif rakyat dalam pengelolaan pendidikan, tetapi di sisi lain terjadi fenomena melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Persiapan penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan sangat penting untuk diinstitutionalisasi. Karena perubahan kebijakan pendidikan desentralistik sarat dengan harapan perbaikan pembangunan pendidikan. Banyak pendapat para ahli pendidikan yang menilai bahwa sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini, bahkan slogan *knowlegde is power* masih jauh dari realitas. Di samping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa *education for all* masih ada dalam tatanan konsep. Pendekatan sentralistik cenderung mematikan asas demokrasi (Tilaar, 1998 dikutip Dwiningrum, 2012). Lebih jauh lagi, sentralisasi pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang gerak bagi masyarakat pendidik. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan massa yang kritis terhadap situasi pendidikan. Sebagai akibatnya, lembaga pendidikan kurang berperan sebagai ruang publik, bagi tumbuhnya demokrasi. Dampak yang lebih mendalam dari hegemoni pendidikan adalah terjadinya marginalisasi pendidikan lokal dan pengikisan budaya-budaya lokal.

Sebagai akibatnya, masyarakat lokal mengalami anomie, alienasi, dan kehilangan identitasnya, serta kehilangan kebhinekaannya (Makmuri, 2003:5).

Realisasi desentralisasi pendidikan bukanlah konsep yang mudah diaplikasikan, karena konsep ini memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Penerapan kebijakan wajib belajar sangat membutuhkan dukungan sosial, partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Smith, Turner dan Hulme, dikutip oleh Teguh Yowono (2003, 37-38), meliputi: pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik, stabilitas politik, ekualitas politik, akuntabilitas, respon pemerintah. Dukungan tersebut diperlukan dalam merespon kebijakan pendidikan dasar karena dengan adanya dukungan tersebut hasil dan manfaatnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, implementasi desentralisasi pendidikan dasar akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk mengatasi masalah pemerataan dan kesempatan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Turner bahwa ada beberapa manfaat desentralisasi (Dwiningrum, 2010:8). Jika dianalisis dari manfaat desentralisasi pendidikan dasar, maka dalam menerapkan kebijakan wajib belajar memerlukan beberapa pemikiran yang komprehensif agar hasilnya dapat mengatasi persoalan pendidikan dasar lebih optimal. Dalam konteks inilah desentralisasi pendidikan akan dirasakan manfaatnya dalam proses pembangunan pendidikan dasar jika (Dwiningrum, 2013):

- a. Pemerintah pusat merencanakan lebih khusus tentang program wajib belajar sesuai dengan informasi yang terbaru dari kondisi anak-anak usia sekolah yang membutuhkan pendidikan dasar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal, perlu adanya peta masalah dan peta program di tingkat daerah (*locally spesific plans*);
- b. Pemerintah pusat mengorganisasikan lembaga pendidikan dasar di tingkat daerah secara intensif untuk memetakan jumlah anak usia sekolah pendidikan dasar dengan lebih fokus sesuai dengan kondisi riil di masyarakatnya, perlu peta jumlah lembaga pendidikan dasar dan kapasitas sosial, serta program unggulan (*inter-organizational coordination*);
- c. Pemerintah pusat merancang perbaikan program wajib belajar dengan memberikan kesempatan yang lebih besar

pada semua anak usia sekolah untuk bersekolah dengan mengembangkan strategi yang inovatif dengan pendekatan sosio-budaya masyarakat, sehingga jumlah anak usia sekolah dasar berkurang secara dratis pada setiap wilayah tingkat daerah perlu beberapa program alternatif (*experimentation and innovation*);

- d. Pemerintah pusat memotivasi semua unsur masyarakat agar memiliki tanggung jawab mentuntaskan wajib belajar sebagai gerakan moral dan sosial dengan membuat program budaya sadar sekolah, perlu adanya sosialisasi dengan berbagai media komunikatif (*motivation of field-level personnel*);
- e. Pemerintah pusat mengurangi beban pekerjaan dengan membuat pemetaan pekerjaan yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga program perbaikan kualitas program wajib belajar dapat diputuskan sesuai dengan kebutuhan daerah yang dirancang lebih fokus dan realistis, perlu ada peta beban kerja dan kinerja lembaga pendidikan dasar (*workload reduction*)

Berdasarkan analisis manfaat di atas ada kecenderungan bahwa realisasi wajib belajar belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik. Praktik wajib belajar belum mengacu pada upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, desentralisasi pendidikan belum memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, sehingga pembangunan desentralisasi dapat melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal dilihat dari kepentingan pusat, desentralisasi diharapkan dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya. (Dwiyanto, 2005:49-50). Dalam konteks inilah, efektivitas penerapan kebijakan wajib belajar di era otonomi daerah akan memberikan kontribusi bagi pemandirian bangsa. Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dasar, khusus program wajib belajar merupakan fondasi bagi kelangsungan keberhasilan pendidikan di tingkat pendidikan lanjutan. Artinya, selama problem wajib belajar belum diatasi secara struktural maupun kultural, maka akan semakin sulit membangun bangsa yang mandiri.

Peran Modal Sosial Dalam Mengatasi Kendala Struktural dan Kultural

Permasalahan di atas salah satunya bersumber dari melemahnya modal sosial dalam struktur dan kultur masyarakat. Secara struktural, modal sosial belum berperan sebagai kekuatan masyarakat dalam membangun kesadaran warga masyarakat untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini didukung hasil temuan Tim Bank Dunia bahwa desentralisasi pendidikan menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi, dan efektivitas usaha pendidikan; pembagian kekuasaan politik; peningkatan kualitas pendidikan; dan peningkatan inovasi dalam penyelidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang masih menjadi masalah dalam praktik pengelolaan pendidikan desentralistik (Dwiningrum, 2010, 2012). Dalam dimensi kultur, modal sosial cenderung terus melemah dalam kehidupan sosial yang ditandai dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada negara yang ditandai dengan kurang adanya respon yang kuat dari masyarakat sejak berdirinya bangsa Indonesia 1945 untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagai buktinya pelaksanaan program-program pemerintah belum berhasil untuk merealisasikan secara kuat visi tentang arah kehidupan bangsa dan negara yakni *"...membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. Makna mencerdaskan kehidupan pada hakikatnya adalah hasrat untuk membangun peradaban negara dan bangsa yang benar-benar maju, modern dan tangguh di kancah pertarungan global (Sairin, 2012: ix). Oleh karena itu, visi bangsa Indonesia harus terus diperjuangkan dalam pemandirian bangsa dalam tantangan global.

Modal sosial dibutuhkan untuk merealisasikan visi bangsa Indonesia dalam mengatasi kendala struktural dan kultural dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang desentralistik. Dalam hal ini,

mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan, karena modal sosial, inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sangsi sosial bagi para anggotanya (Hauberer, 2011: 249). Dengan modal sosial diharapkan terbentuk 'agregat sumber daya yang potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama'. Nilai ikatan yang dijalin seseorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Koneksi sosial memerlukan kerja. (dalam John Field, 2010:23). Dengan modal sosial terbangun properti hubungan antara individu-individu yang merupakan aktor sumber daya yang dapat menggunakan dan manfaat dari hubungan sosial tersebut untuk membangun visi bangsa Indonesia. Dalam analisis Bourdieu dan Coleman dengan modal sosial akan terbangun kemudahan atas dukungan dan produksi dan pelestarian kepercayaan dalam struktur sosial (Hauberer, 2011:250) yang sangat diperlukan untuk membangun struktur sosial yang kuat. Karena dengan modal sosial akan terbangun jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Putnam, 1996:56 dalam Filed, 2011:51). Dengan modal sosial sebagaimana dijelaskan oleh Coleman, akan terbangun kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi khususnya dalam pengelolaan pendidikan.

Menggal dan menciptakan modal sosial tidak mudah, sebagaimana dijelaskan oleh Coleman ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti halnya adanya penutupan jaringan sosial, stabilitas struktur sosial, ideologi dan faktor-faktor lainnya (2012:439-444). Namun demikian, dengan memahami konsep pokok modal sosial, maka upaya untuk mengatasi kendala struktural dan kultural dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan desentralistik, dapat diatasi dengan penguatan unsur-unsur modal sosial. Adapun unsur-unsur modal sosial (Hasbullah, 2011), jika dikaitkan dengan kebijakan wajib belajar secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Unsur Modal Sosial	Struktur	Kultur
Partisipasi dalam jaringan sosial	Keterlibatan semua unsur masyarakat dalam merancang program pendidikan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan pendidikan untuk semua, khususnya program wajib belajar sebagai kebijakan pembangunan pendidikan.	Mengembangkan aktivitas sosial yang bertujuan untuk menguatkan jaringan sosial dalam program membangun sadar anak bersekolah melalui kerjasama antar organisasi sosial.
Saling tukar kebaikan	Membangun kerjasama dan kepedulian antar pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan masyarakat terdidik sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 45 dan PP tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Wajib Belajar lebih demokratis.	Membentuk pusat belajar pada masyarakat sebagai media untuk saling belajar antar warga sehingga tercipta masyarakat pembelajar pada setiap wilayah yang terprogram sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terkontrol oleh pemerintah daerah.
Norma sosial	Menguatkan penerapan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan tegas, bertanggung jawab, komitmen untuk merealisasikan visi UUD 1945 dan Sistem Pendidikan Nasional, Wajib belajar yang sudah diatur oleh PP	Membuat aturan yang dapat disepakati bersama oleh warga masyarakat untuk menciptakan ketertiban, disiplin, tanggung-jawab dan kepedulian antar warga masyarakat yang memberikan kesempatan pada semua anak, khususnya usia wajib belajar melakukan budaya belajar di keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai gerakan moral bangsa.
Nilai-nilai sosial	Mensosialisasikan nilai-nilai karakter yang sangat penting dalam membangun struktur masyarakat dan struktur pemerintah yang berkarakter kuat untuk membentuk resiliensi sosial dalam menghadapi tantangan global.	Mensosialisasikan nilai-nilai karakter untuk membentuk pribadi yang berkarakter yang mendukung program budaya sadar bersekolah yang dimulai pada keluarga, masyarakat.
Tindakan yang proaktif.	Merancang strategi dan program pendidikan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan pendidikan pada masing-masing pemerintah daerah berdasarkan struktur umur dan data kondisi anak, khususnya peta anak wajib belajar pada pemerintah daerah.	Mengembangkan ide dan gagasan serta aktivitas sosial yang mendukung program-program pemerintah dalam membangun budaya belajar untuk menggerakkan seluruh warga masyarakat dengan membangun pusat belajar di masyarakat

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan pendidikan untuk semua, khususnya pada era otonomi daerah membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Modal sosial dapat digunakan sebagai modal awal dalam menggerakkan masyarakat untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan desentralistik pada masyarakat yang secara struktural masih memiliki kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia yang relatif masih tinggi, dan tidak mudah diatasi hanya dengan pengurangan kesenjangan pendidikan. Demikian halnya, proses pembangunan pendidikan untuk semua masih memerlukan strategi kreatif dan proaktif yang harus dilakukan oleh pemerintah agar perbaikan di bidang ekonomi diharapkan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dengan mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan juga secara otomatis akan mendapatkan penghasilan tinggi atau kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi juga sehingga perbaikan kualitas pendidikan lebih terealisasi. Dalam konteks inilah, modal sosial sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala struktural, karena membangun struktur yang "equal dan equity" membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, sehingga sangat membutuhkan sinergitas unsur modal sosial dalam prosesnya. Di samping itu, modal sosial juga diperlukan untuk mengatasi kendala kultural. Hal yang penting bahwa untuk mengubah struktur ditentukan oleh *the power of culture* untuk mendukung keberhasilan dalam kebijakan pendidikan dasar yang desentralistik.

Kajian tentang pendidikan tak pernah berhenti, karena proses pendidikan akan ada sepanjang hayat, sepanjang nafas kehidupan manusia. Membangun struktur yang kuat dan kultur yang melestarikan nilai-nilai penting dalam diri manusia yang tak akan berhenti, manusia akan terus belajar, selama manusia masih ingin berubah-berkembang-bermanfaat-bermakna bagi dirinya, bagi kehidupan masyarakat dan negara. Pada akhir tulisan ini ada beberapa kalimat yang dapat kita renungkan bersama, seperti dijelaskan oleh Alamo Heights (Sergiovanni, 199:6)

"kita telah kehilangan bagian penting yang baik: lingkungan dan keluarga. Meskipun kita tidak bisa kembali ke waktu yang lebih sederhana, kita masih harus menemukan cara untuk memberikan anak tempat yang aman untuk tumbuh, kesempatan untuk bermain dan membuat kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang dewasa, khususnya dalam mengembangkan potensi secara optimal"

"kita telah kehilangan waktu untuk menunjukkan bangsa yang kuat dan mandiri, tetapi kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki bangsa ini, karena kita punya mimpi, kita punya suara hati, kita punya keinginan, kita punya kemauan, kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi anak bangsa dengan kekuatan modal budaya dan modal sosial yang masih belum tergalai dan dikelola dengan optimal oleh seluruh anak bangsa" (Dwiningrum, 2013)

Penutup

Paparan di atas belum sampai pada analisis akhir dalam menjawab persoalan pendidikan di Indonesia, karena kompleksitas masalah pendidikan di Indonesia. Dua hal yang ingin disimpulkan pada akhir penulisan makalah ini *pertama*, realisasi pendidikan untuk semua masih menghadapi dua kendala yakni kendala struktural dan kendala kultural yang membutuhkan penanganan yang bersifat komprehensif, khususnya di era otonomi daerah. Kebijakan pendidikan dasar belum mampu mengatasi masalah pembangunan pendidikan, khususnya untuk program wajib belajar sebagai salah satu bentuk respon terhadap program *education for all*, masih sulit untuk direalisasikan karena struktur masyarakat Indonesia masih menggambarkan kesenjangan ekonomi-sosial yang tinggi sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan belum sama pada semua level pendidikan. Demikian halnya, budaya sadar bersekolah belum kuat dalam kehidupan masyarakat yang digambarkan dengan fenomena sosial masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Implementasi program pendidikan wajib belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan penangananan pada tatanan level keluarga dan level masyarakat. Khususnya, kepedulian pemerintah untuk membangun

budaya sadar bersekolah menjadi gerakan moral bangsa yang secara terus-menerus disosialisasikan untuk membangun pemandirian bangsa yang sangat membutuhkan kekuatan menggerakkan modal sosial.

Kedua, eksistensi *education for all* membutuhkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Eksistensi pendidikan untuk semua membutuhkan penguatan modal sosial dalam dimensi struktur dan kultur. Persoalan struktur sangat kompleks sekali, dikarenakan kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia relatif masih tinggi yang tidak mudah diatasi dengan pengurangan kesenjangan pendidikan. Dalam konteks inilah, upaya membangun struktur membutuhkan *the power of culture* yang dinilai sebagai aspek penting untuk mendukung keberhasilan dalam kebijakan pendidikan dasar yang desentralistik. Membangun kompetensi kultur menjadi prasyarat penting dalam merealisasikan *education for all*. Untuk itu perlu dibangun kekuatan kompetensi kultural pada setiap daerah sebagai gerakan moral bangsa untuk membangun budaya sadar bersekolah.

Daftar Pustaka

- Blackledge, David dkk (1983). *Sociological Interpretation of Education*, London: Chroom.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan A.Hasan Basri, Jakarta:LP3ES
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan A.Hasan Basri, Jakarta:LP3ES.
- Brown, Daniel J. (1990). *Decentralization and School Based Management*. London: The Falmer Press.
- Coleman, James S (2011), *Dasar-dasar Teori Sosial*, Bandung: Nusa Indah

- Depdikdasmen (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2013), "Developing Cultural Competence in the Policy of Primary Education Decentralization" , *Makalah*, Seminar Internasional Empowering The Primary Education For The Brigter Generation, UNY
- _____. (2012), "Dinamika Struktur dan Kultur Dalam Penerapan Desentralisasi Pendidikan", dalam *Cakrawala Pendidikan*, Yogyakarta, UNY, Mei 2012, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis.
- _____. (2011), "Pendekatan Holistik dan Kontekstual dalam Mengatasi Krisis Karakter di Indonesia", dalam *Cakrawala Pendidikan*, Yogyakarta, UNY, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis.
- _____. (2010), *Desentralisasi dan Dinamika Sosial*, *Ringkasan Disertasi*, Pascasarjana UGM.
- Field, John (2010), *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset .
- Hauberer, Julia (2011), *Social capital Theory*, VS Reseach.
- Hasbullah. Jousairi (2006), *Social Capital*, Jakarta: M-R United Press
- Lin, Nan (2004), *Social Capital*, Australia : Cambrigde University.
- Makmuri, dkk. (2003). *Demokratisasi Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI
- Rahardjo, Mudjia (2010), *Mengenal Modal Sosial*, Friday, 14 May 2010 07:21 <http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/204-mengenal-modal-sosial>.
- Sairin, Weinata (2012), *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*, Jakarta: Media Prima Aksara.
- Sergiovanni, Thomas (1993), *Building Community in Schools*, San Fransisco: Yossey-Bass Publisher.
- Suyata, 2011 , *Catatan Kuliah Persekolahan* , Progam Ilmu Pendidikan S3 PPs UNY.

- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera
- Yuwono, Teguh (2003). *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Clogapps Diponegoro University
- Zamroni (2005). *Meningkatkan Mutu Sekolah: Teori, Strategi dan Prosedur*.
- _____. (2011), *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama
- <http://topik-utama.koranpendidikan.com/view/3298/putussekolah-jamin-beasiswa.html>

KAJIAN ECONOMIC RETURNS OF EDUCATION

Oleh:
Dr. Lantip Diat Prasojo
lantip@uny.ac.id

Pendahuluan

Investasi dalam pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga sulit untuk mengukur hasil-hasil pendidikan secara ekonomi. Namun demikian, bukan berarti hasil-hasil pendidikan berdasarkan kacamata ekonomi tidak dapat diukur, tetapi hasil-hasil pendidikan tersebut bisa diukur dengan jangka waktu tertentu. Sebagai sebuah investasi, pendidikan merupakan komoditi dalam pandangan ekonomi, hal ini menempatkan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dihasilkan dan dimiliki oleh individu-individu dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Melalui jenis pekerjaan yang bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki dan latar belakang pendidikan yang dijalani.

Investasi pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan yang baik dalam kehidupan masyarakat karena baik secara langsung maupun tidak langsung individu yang terdidik akan mempunyai pengetahuan yang dapat meningkatkan *skills*, kreativitas, inovasi dan lain-lain. Hasil pengetahuan yang berupa *skills*, kreativitas, inovasi dan lain-lain dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan. Berdasarkan uraian di atas, maka makalah ini memfokuskan pada kajian hasil-hasil ekonomi dari pendidikan yang didasarkan pada teori-teori ekonomi pendidikan yang terkait dengan masalah tersebut.

Nilai Keuntungan dari Pendidikan

Nilai pasar manusia berubah secara dramatis seiring dengan fluktuasi-fluktuasi persediaan tenaga kerja, seperti yang diamati oleh Tuchman (John, Morphet, & Alexander, 1983), penurunan populasi dengan sendirinya mempengaruhi nilai individual yang direfleksikan dalam perbaikan unah. Penilaian terhadap manusia sesungguhnya